



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 96 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perkebunan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERKEBUNAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Daerah yang melaksanakan urusan teknis Dinas dibidang pemerintahan yang menjadi wewenang Dinas induknya dan mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala UPT Dinas Perkebunan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Kepala Sub Bagian adalah pejabat yang memimpin Sub Bagian pada UPT Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara.
10. Kegiatan Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
11. Perjanjian Kinerja adalah keluaran/ hasil dari kegiatan /program yang hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.
12. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP adalah iktisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

13. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut RENSTRA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut RENJA adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggaraan Negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP/07/KPK/02/2005.
16. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi.
17. Laporan Pajak-pajak Pribadi selanjutnya disingkat LP2P adalah laporan pajak-pajak pribadi yang wajib disampaikan Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Golongan III.a keatas sesuai dengan penghasilannya kepada Menteri Dalam Negeri.
18. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati kepada DPRD selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
19. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
20. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat LKPD adalah laporan keuangan berupa realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan oleh satuan kerja perangkat daerah selama 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
21. Kelompok Jabatan Fungsional disebut Kelompok Jafung adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) UPT Dinas Perkebunan, merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan sebagian urusan teknis operasional dan penunjang Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan dan dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis.

(2) UPT dan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :

a. UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat :

1. Kecamatan Anggana dengan wilayah kerja di Kecamatan Anggana dan berkedudukan di Kecamatan Anggana;
2. Kecamatan Marang Kayu dengan wilayah kerja di Kecamatan Marang Kayu dan berkedudukan di Kecamatan Marang Kayu;
3. Kecamatan Muara Badak dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Badak dan berkedudukan di Kecamatan Muara Badak;
4. Kecamatan Sanga-Sanga dengan wilayah kerja di Kecamatan Sanga-Sanga dan berkedudukan di Kecamatan Sanga-Sanga;
5. Kecamatan Samboja dengan wilayah kerja di Kecamatan Samboja dan berkedudukan di Kecamatan Samboja;
6. Kecamatan Muara Jawa dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Jawa dan berkedudukan di Kecamatan Muara Jawa;
7. Kecamatan Loa Kulu dengan wilayah kerja di Kecamatan Loa Kulu dan berkedudukan di Kecamatan Loa Kulu;
8. Kecamatan Loa Janan dengan wilayah kerja di Kecamatan Loa Janan dan berkedudukan di Kecamatan Loa Janan;
9. Kecamatan Tenggarong dengan wilayah kerja di Kecamatan Tenggarong dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong;
10. Kecamatan Tenggarong Seberang dengan wilayah kerja di Kecamatan Tenggarong Seberang dan berkedudukan di Kecamatan Tenggarong Seberang;
11. Kecamatan Sebulu dengan wilayah kerja di Kecamatan Sebulu dan berkedudukan di Kecamatan Sebulu;
12. Kecamatan Muara Kaman dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Kaman dan berkedudukan di Kecamatan Muara Kaman;
13. Kecamatan Kota Bangun dengan wilayah kerja di Kecamatan Kota Bangun dan berkedudukan di Kecamatan Kota Bangun;
14. Kecamatan Muara Wis dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Wis dan berkedudukan di Kecamatan Muara Wis;
15. Kecamatan Muara Muntai dengan wilayah kerja di Kecamatan Muara Muntai dan berkedudukan di Kecamatan Muara Muntai;

16. Kecamatan Kenohan dengan wilayah kerja di Kecamatan Kenohan dan berkedudukan di Kecamatan Kenohan;
 17. Kecamatan Kembang Janggut dengan wilayah kerja di Kecamatan Kembang Janggut dan berkedudukan di Kecamatan Kembang Janggut; dan
 18. Kecamatan Tabang dengan wilayah kerja di Kecamatan Tabang dan berkedudukan di Kecamatan Tabang;
- b. UPT Pembenihan Kebun Dinas dan Pengolahan Hasil, dengan wilayah kerja lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara dan berkedudukan di Tenggarong;
 - c. UPT Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati, dengan wilayah kerja lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara dan berkedudukan di Tenggarong; dan
 - d. UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun, dengan wilayah kerja lingkup Kabupaten Kutai Kartanegara dan berkedudukan di Tenggarong;
- (3) Kepala UPT Dinas Perkebunan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perkebunan.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis Dinas Perkebunan yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang Dinas dibidang urusan Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat, Pembenihan Kebun, Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun yang menjadi kewenangan Dinas induknya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan Dinas Induknya sebagaimana ayat (1) diatas, kegiatan yang dilimpahkan ditegaskan dalam bentuk Surat Pendelegasian Wewenang dari Kepala Dinas kepada Kepala UPT sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT Dinas Perkebunan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. membantu Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat, Pembenihan Kebun, Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun sesuai dengan urusan yang dilimpahkan;

- b. pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat, Pembenihan Kebun, Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati dan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun; dan
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh perangkat UPT.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Penyuluhan dan Pengembangan Perkebunan Rakyat, UPT Pembenihan Kebun Dinas dan Pengolahan Hasil, UPT Proteksi Tanaman dan Laboratorium Hayati dan UPT Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun pada Dinas Perkebunan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Susunan Organisasi UPT Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Kesatu Kepala UPT

Pasal 7

Uraian Tugas Kepala UPT meliputi :

- a. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan Umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. mengkoordinir dan mengendalikan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;

- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilimpahkan;
- f. mengkoordinir, mengendalikan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan Urusan Teknis yang dilimpahkan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Kedua
Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan administrasi yang meliputi, urusan Umum kerumahtanggaan, kehumasan dan keprotokolan UPT;
- b. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan pelayanan aparatur yang meliputi, urusan Kepegawaian, Keuangan, peralatan dan perlengkapan UPT;
- c. merencanakan dan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan daerah yang meliputi, Perjanjian Kinerja RENSTRA, RENJA, LKjIP, LKPD dan LPPD, LHKPN, LP2P pada awal dan setiap akhir tahun berjalan;
- d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap perkembangan penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi beban dan tanggungjawab;
- f. merencanakan, melaksanakan dan memberikan advist teknis terhadap pengelolaan Urusan Teknis yang dilimpahkan Kepala UPT; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Dinas Perkebunan sesuai dengan keahlian dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan keahlian.
- (2) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan Dinas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 26 Oktober 2016

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2016

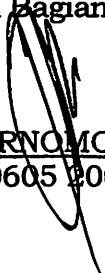
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H.MARLI, M.Si
NIP 19590206 198802 1 002

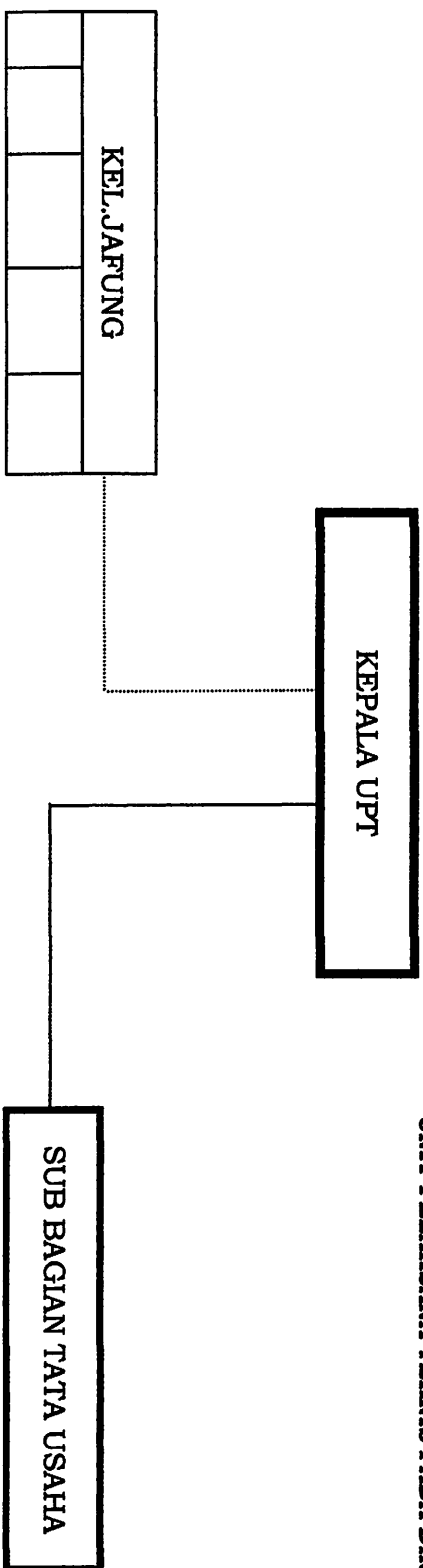
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016 NOMOR 96

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNO MO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 96 TAHUN 2016 TANGGAL 26 OKTOBER 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PERKEBUNAN**

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS PERKEBUNAN**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
tttd

RITA WIDYASARI